

**KEPEMIMPINAN BUPATI SIAK DALAM BIDANG PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN PRIODE 2011-2016**

By: Gusmaksum

Gusmaksum935@gmail.com

Supervisor: **Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Library of Riau University

Department of Government

Faculty of Social Science and Political Science

University of Riau

Campus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simp. New Pekanbaru

Phone Fax 0761-63277

ABSTRACT

Leadership or leader was important for sustainable success as a leader it is concerned with the direction, vision and focus on the development of a region, the success or failure of a person's economic development depends on leaders. This study was conducted to determine the leadership of Regent Siak in the field of economic development is applied, in this case the Regent Siak adopts a democratic leadership, Writer Want to examine more about Regent Siak Leadership in Economic Development Sector Period 2011-2016.

The problem in this research is how the leadership of Regent Siak in the field of economic development and how the economic development of Siak and what are the factors that influence the economic development of Siak. The purpose of this study was to determine Siak district leader in the field of economic development, to determine the economic development of Siak and to determine the factors that influence the economic development of Siak. This study used a qualitative approach with descriptive qualitative research methods. The informants namely Regent Siak. Namely data collection techniques with interviews to determine the extent of the Regent Siak leadership in economic development. Qualitative data analysis technique that is performed on the data, in this case in the form of qualitative data informaasi then linked with other data to gain clarity and truth.

Results of this study was the Regent of Siak in running the leadership has the properties that form in itself, namely intelligence, maturity and flexibility of social relationships, motivation and encouragement of achievement and attitudes of human relationships. In the development process prekonomian have seen that the economic development indicators such as per capita income, economic structure, savings rates, quality of life index, the human development index. Economic development can not be separated from the factors that affect the progress of, among others, resources, culture within the bureaucracy, political, social, science and technology.

Keywords: Leadership, Economic Development

PENDAHULUAN

Kepemimpinan secara umum Menurut Covey (2001:305) pemimpin itu penting bagi keberhasilan yang berkelanjutan karena pemimpin itu berkaitan dengan arah, visi dan berfokus pada hal-hal yang penting. Pemimpin berusaha untuk mengurangi hal-hal yang menghambat, sambil mengakui bahwa dalam suatu kelompok yang saling melengkapi, kekuatan justru terdapat dalam perbedaan, karena peran dasar seorang pemimpin adalah untuk memperkuat saling melengkapi dimana setiap kekuatan dibuat produktif dan setiap kelemahan dibuat tidak berarti, seorang pemimpin haruslah mempunyai kriteria dan sifat-sifat yang baik di dalamnya agar dalam memimpin suatu organisasi pemimpin mampu mengontrol dirinya sendiri dan orang lain agar tercapainya suatu tujuan tentu, karena sifat kepemimpinan itu tidak seluruhnya dilahirkan tetapi dapat juga dicapai lalui pendidikan dan pengalaman. Berikut adalah sifat umum yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Menurut Keith Davis (dalam Miftah Thoha, 2012:33) 4 sifat umum yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan organisasi adalah:

1. Kecerdasan
2. Kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial
3. Motivasi dan dorongan berprestasi
4. Sikap-sikap hubungan kemanusiaan.

S. Pamudji (1999:91-94) Seorang pemimpin yang berkarakter harus memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adil, kemampuan memperlakukan anak buah secara sama, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain serta tidak ada anak emas dan anak tiri.
2. Arif-bijaksana, ialah kecakapan dan kepandaian bertindak atau berbuat menghadapi orang lain.
3. Penuh prakarsa (inisiatif), yaitu sumber inspirasi dan sumber dinamika yang mampu menggerakkan orang-orang.
4. Percaya pada diri sendiri, yaitu sesuatu yang menimbulkan keseimbangan jiwa dan fikiran-

fikiran yang pada akhirnya menumbuhkan semangat optimism dalam rangka mencapai tujuan.

5. Penuh daya pemikat, yaitu sesuatu yang dapat menarik atau memikat perhatian orang misalnya, gaya berpidato, gaya penampilan, bentuk atau potongan tubuh dan sebagainya.
6. Ulet, yaitu sifat tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan, dan selalu berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan.
7. Mudah mengambil keputusan, yang menggambarkan sifat tegas, sifat tidak ragu-ragu, sehingga segala sesuatu dapat dilaksanakan.
8. Jujur, yaitu sifat suka bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dalam rangka mencapai tujuan.
9. Berani mawas diri, yaitu sifat melihat kedalam diri sendiri dan kedalam tubuh organisasi untuk melihat kekurangan-kekurangan, untuk selanjutnya menutupi.
10. Komunikatif, yaitu sifat mudah menyampaikan sesuatu kepada orang lain, dengan menggunakan cara-cara dengan gaya mudah diterima.

Dalam penerapannya kemampuan seorang pemimpin untuk memberi keputusan dengan baik tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan dalam dirinya dengan segala potensi yang dimilikinya. Disinilah kematangan berfikir dari seorang pemimpin dibutuhkan. Dalam hal ini, kejujuran merupakan salah satu indikator paling penting yang harus dimiliki dari seorang pemimpin.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas dan Wewenang,

serta Kewajiban Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 25 Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakanyang ditetapkan bersama DPRD,
2. Mengajukan rancangan Perda,
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD,
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama,
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah,
6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan,
7. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(Sumber : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Kabupaten Siak adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. pada awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura.

Di era kepemimpinan Drs. H. Syamsuar, M.Si mempunyai Visi dan Misi jangka menengah tahun 2011-2016.

Visi Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan

Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Sebagai Kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016”

Misi Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan, serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya yang terbarukan.
3. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian perdesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.
4. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengemplementasikan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*Clean Government And Good Governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepala desa.

Prestasi Bupati Drs. H. Syamsuar, M.Si ini memang terhitung cukup banyak, Ini membuktikan bahwa tingginya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Siak kepada beliau yang dinilai mampu membangun daerah untuk terus berkembang dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah, Beberapa penghargaan dan perstasi yang

diterima oleh Kabupaten Siak dibawah kepemimpinan beliau adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan Indonesia *governance index (IGI)*, Kabupaten Siak sebagai daerah otonom baru terbaik se-indonesia.
2. Penghargaan investment awards 2014, meraih peringkat ke3 pada nominasi 5 pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal (PTSP-PM) Kabupaten terbaik tahun 2014.
3. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tiga kali berturut atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2011, 2012 dan tahun 2013 yang diberikan oleh menteri keuangan RI.
4. Penghargaan piala wahana tata nugraha (WTN) yang kedua kali dari kementerian perhubungan RI katagori kota kecil tertib lalu lintas.
5. Penghargaan Darma Bhakti atas jasa perkembangan dan pengembangan pramuka di Kabupaten Siak pada upacara peringatan Hari Pramuka ke 53 dari Presiden RI.
6. Koprasi terbaik nasional jenis koprasi produsen KUD jaya makmur desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun diberikan oleh Menteri Negara Koprasi dan UKM tahun 2014.
7. Penghargaan kategori Desa Pelaksana Terbaik (Desa Semina) Kecamatan Kerinci Kanan) peringkat dua Nasional pada peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dari Kementrian Dalam Negri, Tahun 2014.
8. Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari BKKBN pusat kepada TP PKK Kabupaten Siak, tahun 2014.
9. Penghargaan Anugrah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada peringatan Bulan Bhakti K3 dari Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi, tahun 2014.

10. Penghargaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Award 2014 sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan UPI bagi daerah yang telah menjadi mitra kerja dalam membangun pendidikan didaerah tahun 2014.

11. Juara 1 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Tingkat Nasional atas nama SAMIRAN Koperasi Karya Tunggal Desa Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam, tahun 2014.

(Sumber : RKPD Kabupaten Siak Tahun 2015).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Dalam konteks ini pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dihasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (**Suyanto Bagong, 2010:5**). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Siak, Kantor BPS, kantor BAPPEDA. Alasan pemilihan lokasi ini adalah, karena disini lah data pendukung yang diperlukan untuk penelitian ini untuk memperoleh data-data maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya sehingga data yang diperoleh lebih tepat dan lebih akurat.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi kepada informan pada obyek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara

mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Teknik pengambilan data secara tertulis bersumber pada catatan-catatan, arsip-arsip, gambar atau foto pada acara-acara tertentu yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian dan bertujuan untuk memperjelas dan mendukung proses penelitian (**widodo, 2012:61**). Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

3. Observasi

Observasi yaitu sebagai perhatian yang terfokus pada kajian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor penyebabnya, dan menemukan kaedah-kaedah yang mengaturnya (**ezmir, 2012:36**). Observasi atau pengamatan langsung ke lapangan. Teknik ini dilakukan untuk mendukung data-data yang penulis dapatkan dari data-data yang sebelumnya telah penulis dapatkan.

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, (P. Joko Subagyo, 2004:94). Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*versetehen*), yaitu berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. (Lexi J. Meleong, 2007: 280).

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-

temuan lapangan (baik berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain sebagainya) yang selanjutnya akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut sebagaimana yang dikemukakan oleh **Nasution (1998:129)**:

1. Reduksi data

Data yang didapat dari lapangan masih berupa uraian atau laporan yang terperinci yang akan terasa sulit bila tidak tereduksi, dirangkum hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dicari polanya. Jadi laporan lapangan sebagian bahan mentah disingkat, direduksi lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

2. Display(penyajian) data

Bagian-bagian tertentu pada penelitian dengan menggunakan tabel dan grafik penelitian.

3. kesimpulan dan verifikasi

menarik hasil akhir dari penyajian data dan menguji kebenaran hasil kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Bupati Kepemimpinan Bupati Siak Bidang Pembangunan Perekonomian Priode 2011-2016

Membicarakan kepemimpinan memang menarik, dan dapat dimulai dari sudut mana saja bisa dilihat dari waktu kewaktu kepemimpinan menjadi perhatian manusia. Ada yang berpendapat masalah kepemimpinan itu sama tuanya dengan sejarah manusia. Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Surtu pihak manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin dipihak lain adaorang yang memjpunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin.

Hampir disetiap tulisan tulisan tentang kepemimpinan memberikan gambaran yang ideal tentang kepemimpinan dan berakhir dengan kesenangan. Hal ini

dapat dimengerti, Karena manusia membutuhkan kepemimpinan itu dan dari waktu ke waktu kepemimpinan menjadi tumpuan dan harapan dari manusia. Keterlibatan pemimpin dalam pengisian jabatan pasca reformasi mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Seorang pemimpin haruslah mempunyai syarat-syarat kepemimpinan agar seorang pemimpin mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut Keith Davis dalam Miftah Thoha (2012:33) adalah sebagai berikut :

3.1.1 Kecerdasan

Seorang pemimpin wajib mempersiapkan dirinya dengan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, perencanaan dan keberanian untuk bertindak terhadap kewajibannya. Pemimpin tidak hanya harus memperhatikan gaya dan penampilan fisik yang luar biasa, tapi dia juga harus mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk membuat dirinya mampu berkerja dengan cerdas dan tegas. Kecerdasan ini dimana seseorang pemimpin haruslah cerdas terlebih cerdas dari orang-orang yang dipimpin, maksudnya ketika seseorang pemimpin dibawah kecerdasan bawahnya maka akan timbul sesuatu hal yang mungkin saja buruk. Contohnya saja seorang pemimpin akan lebih banyak diatur oleh anggotanya ataupun masyarakatnya dan pada saat itulah peran seseorang pemimpin tidak terlihat lagi. Karena seorang pemimpin yang baik seharusnya menjadi panutan bagi orang sekitar.

3.1.2 Kedewasaan Dan Keleluasaan Hubungan Sosial

Para pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta mempunyai perhatian yang luas terhadap aktifitas-aktifitas sosial. Dia mempunyai keinginan menghargai dan dihargai. Karena dengan begitu akan lebih baik seorang pemimpin yang dengan kedewasaannya bertindak untuk mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan kegiatannya. Seorang pemimpin dengan kedewasaannya memimpin serta

keleluasaannya dalam hubungan sosial dengan saling menghargai pasti akan membuat suatu perubahan yang baik untuk kedepannya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kepentingan masyarakat dapat mengukur keberhasilan seorang pemimpin dimana dengan tindakan seperti itu masyarakat pun akan menjadi senang serta sikap saling menghargai akan timbul dikemudian harinya. Kepemimpinan tidak terlepas dari peran ideal seseorang dalam memimpin. Seorang pemimpin harus dapat menempatkan diri sebagai teladan, penasehat, pembimbing dan penyemangat bagi masyarakatnya. Seorang pemimpin itu laksana seorang guru yang telaten dengan mendidik murid-muridnya untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik.

3.1.3 Motivasi Diri dan Dorongan Berprestasi

Para pemimpin secara relative mempunyai dorongan motivasi yang kuat untuk berprestasi. Mereka berusaha mendapatkan penghargaan yang intrinsik dibandingkan dari yang ekstrinsik. Dengan adanya semangat dari pemimpin atau atasan maka masyarakat akan merasakan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten siak. Jadi sebagai seorang bupati harus memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat agar supaya mau mengikuti kegiatan pembangunan dan tidak kalah penting yaitu selalu mengingatkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembangunan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pemimpin yang memberi suatu perubahan kearah yang lebih baik pasti akan menjadi kebanggaan bagi orang disekitarnya dan juga pasti akan mendapat pujuan dari rekan-rekannya. Namun sebagai pemimpin haruslah selalu berkerja keras dan terus meningkatkan prestasi walaupun banyak pujuan yang diterima.

3.1.4 Sikap-Sikap Hubungan Kemanusiaan

Berbicara tentang kepemimpinan, tidak terlepas dari peran ideal seseorang dalam memimpin. Seseorang pemimpin harus dapat menempatkan dirinya sebagai teladan, penasehat, pembimbing dan penyemangat bagi rakyatnya. Pemimpin harus bisa mengenali dan menghargai seluruh anggota, pengikut dan masyarakatnya supaya dalam menjalankan atau merencanakan suatu kegiatan bisa dengan mudah dilaksanakan. Karena kerja sama yang dihasilkan dari saling mengenali dan menghargai semua maka akan terwujudlah suatu kegiatan yang lebih baik.

Dari uraian diatas dapat diketahui keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari bagaimana dia bisa mengenal dan menghargai orang-orang yang ada disekitarnya karena dengan begitu berliau bisa mudah dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena dengan sikapnya dia juga dihargai dan dikenali. Dengan bersosialisasi, berinteraksi langsung dengan masyarakat dan berkumpul dengan masyarakat maka akan mudah terciptanya suasana yang harmonis antara pemimpin dengan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh bapak syamsuar diatas memang benar adanya karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghargai pekerjaan orang yang ada disekitarnya selalu memberikan apresiasi sekecil apapun

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa salah satu sikap hubungan manusia ketika pemimpin juga menghargai masyarakatnya, karena masyarakatnya merupakan bagian yang sangat penting untuk dipimpin dan hubungan yang baik antara Bupati dengan staf-staf nya akan membuat suatu kemajuan untuk Kabupaten Siak.

3.2 Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Siak Priode 2011-2016

Pembangunan perekonomian daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola suatu kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan perekonomian di suatu negara dan daerah merupakan hal yang paling penting dalam memajukan suatu daerah, untuk melihat pembangunan perekonomian daerah haruslah melalui indikator-indikator perekonomian menurut Deddy T. Tikson (2005) Sejumlah indikator-indikator ekonomi yang banyak digunakan oleh nasional dan daerah masing-masing indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.1. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur. Pendapatan juga dapat digunakan sebagai data kegiatan ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan produksi barang dan jasa oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Selama ini, peningkatan dalam pendapatan nasional telah menjadi fokus dari pengukuran pembangunan.

PDRB per kapita dan Pendapatan Per Kapita adalah salah satu indikator ekonomi yang cukup penting, yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk pada suatu daerah. PDRB per kapita dapat dibahasakan sebagai rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh satu orang penduduk pada suatu daerah. Dan pendapatan perkapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh satu orang penduduk pada suatu daerah. Bila disajikan secara berkala, data tersebut akan dapat menunjukkan adanya perubahan kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan ke arah yang semakin membaik atau sebaliknya.

i. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang

bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi, apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Di daerah industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan; sedangkan di daerah yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan kepada fenomena ini, maka urbanisasi telah digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pembangunan yang dilaksanakan juga mengarah pada pendapatan daerah yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan, melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, membentuk pos pelayanan ditingkat kecamatan, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan *updating* wajib pajak, melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan kinerja BUMD dan peningkatan akurasi data sumberdaya manusia.

Memang dalam melaksanakan pembangunan tidaklah mudah, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak untuk mensejahterakan masyarakat telah dilakukan dan ini merupakan bukti kerja keras. Sehingga hasil yang diperoleh juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kabupaten Siak.

Kabupaten Siak secara nasional saat ini telah menjadi tempat untuk studi banding oleh pemerintah daerah yang berada di luar Sumatera, yang biasanya Kabupaten Siak belajar ke daerah Pualu Jawa akan tetapi sekarang Siak sudah menjadi daerah studi banding, terutama dalam hal melaksanakan pelayanan terpadu satu atap, penerapan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu dalam upaya untuk mendorong dan mengatasi masalah pengangguran pemerintah telah melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk penerapan kurikulum lokal yang bisa mengatasi masalah pencari kerja terutama di sekolah SMK, dan ini merupakan upaya

mengurangi pengangguran karena mereka akan bisa bekerja langsung setelah tamat sekolah.

ii. Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Financial capital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, Dalam masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Investasi, baik untuk industrialisasi maupun perdagangan bisa didukung oleh ketersediaan modal yang dibentuk oleh surplus dan tabungan masyarakat. Dengan demikian, jumlah tabungan masyarakat (domestic saving) dapat dijadikan salah satu indikator pembangunan. Hal ini bisa dilihat dalam PDB suatu wilayah.

Investasi di Kabupaten Siak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nilai investasi dari tahun 2011 hingga semester I tahun 2015, berdasarkan hasil verifikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 4,6 triliun rupiah lebih dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sebesar 2 milyar dollar lebih, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 22.168 orang. Peningkatan jumlah investasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Siak menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang menjanjikan di Provinsi Riau. Beberapa kebijakan, program dan kegiatan strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung investasi antara lain;

Dalam hal percepatan pelayanan di bidang Perizinan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu (BPMP2T) yang diberikan kewenangan seluas-luasnya. Diharapkan pelayanan perizinan mudah, cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, telah dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat, melalui Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kementerian Dalam Negeri telah

menjadikan Kabupaten Siak sebagai daerah percontohan pelaksanaan PATEN.

Menciptakan keamanan, penegakan dan kepastian hukum bersama FORKOMPINDA Kabupaten Siak melalui rapat rutin setiap bulan. Menyiapkan perangkat peraturan daerah yang mendukung investasi, Melakukan kegiatan promosi investasi daerah melalui keikutsertaan dalam berbagai pameran investasi, Membangun infrastruktur yang mendukung investasi lebih baik, Melakukan pengendalian pengawasan penanaman modal, Menerapkan sistem perizinan secara online dan tracking system (SPOTS), Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, Penyusunan database peluang investasi

iii. Indeks Kualitas Hidup (IKH)

IKH atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat karena apabila hanya indikator makro ekonomi digunakan dalam mengukur keberhasilan ekonomi, maka ia tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Indeks ini dihitung berdasarkan:

1. Angka rata-rata harapan hidup

Demikian halnya untuk angka harapan hidup Kabupaten Siak pada tahun 2011 sebesar 71,69 persen jauh rata rata Provinsi Riau yang masih sebesar 71,40 tahun, pada tahun 2012 angka harapan hidup Kabupaten Siak meningkat menjadi sebesar 71,86 tahun di atas angka Provinsi Riau yang hanya mencapai 71,56 persen yang masih sebesar 70,76 tahun.

2. Angka kematian bayi

Angka kematian bayi di Kabupaten Siak juga menempati posisi yang tertinggi. Sejak tahun 2013, dari 1.000 kelahiran, rata-rata tercatat 5 kematian bayi. "Angka itu jauh di bawah nasional bahkan sudah melampaui target RPJMD dan RPJMN tahun 2019 yang berjumlah 24 kematian, Pemerintah daerah terus bekerja lebih keras lagi untuk percepatan terhadap penurunan angka kematian terhadap ibu yang melahirkan. Meskipun terus berkurang dari tahun ketahun, namun angka kematian ibu dari 1.000 melahirkan masih di angka 84 kematian.

3. Angka melek huruf

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Siak telah menyiapkan program pendidikan gratis selama 12 tahun.

Capaian angka melek huruf untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Maret 2015 baru 93,62 persen. Kendati capaian sementara 93,62%, Pemkab Siak menargetkan diakhir tahun 2015 bisa 100 persen. Adapun angka partisipasi jejang pendidikan di Kabupaten Siak, untuk SMP atau MTS 82,51 persen, dan SMA 66,23 persen.

Ide dasar yang melandasi dibuatnya index ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut *The United Nations Development Program* (UNDP), pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.

Capaian hasil pembangunan dan program serta kegiatan prioritas pelayanan publik pada berbagai sektor yang telah dilaksanakan hingga saat ini dalam mewujudkan Rencana Jangka Menengah Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016.

1. Pendidikan

Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (*Education for All*) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan. UUD 1945 mengamatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat tersebut melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Dikatakan, akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi

pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnya pengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T). Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa.

2. Kesehatan

Pada sektor kesehatan berbagai upaya telah kita lakukan guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain; Pembangunan sarana prasarana kesehatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 Pustu sebanyak 19 unit, Poskesdes sebanyak 1 unit, Gudang Obat Puskesmas sebanyak 3 unit, dan Instalasi Farmasi sebanyak 1 unit.

Pada tahun 2015 dalam upaya peningkatan pelayanan di RSUD dilakukan penambahan fasilitas penunjang medis yaitu akan dioperasikannya ruang rawat inap khusus pemulihan penyakit paru. Pembangunan gedung laboratorium Patologi Klinik (pemeriksaan darah, urine, feses dan sekret tubuh lainnya), serta tersedianya fasilitas Hemodialisa (cuci darah) bagi pasien gagal ginjal di RSUD Siak.

3. Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan strategi dan program penanggulangan kemiskinan melalui Peraturan Daerah (PERDA) nomor 10 tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak. Beberapa program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Siak antara lain; Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, antara lain : subsidi Raskin, sembako murah dua kali dalam setahun, pembangunan rumah layak huni rata-rata 180 unit per tahun, beasiswa keluarga miskin, bantuan peralatan sekolah keluarga miskin berupa seragam sekolah, sepatu dan tas, bantuan sosial bagi fakir miskin dan penyandang cacat, bantuan untuk rumah tangga miskin lansia terlantar per bulan Rp200 ribu serta bantuan sosial

kepada yatim piatu. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, antara lain: pelatihan otomotif, menjahit, bordir, pengelasan dan manajemen kewirausahaan.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, antara lain : penyediaan permodalan berupa UED-SP dan KUR, penyelenggaraan promosi produk, peningkatan kemitraan usaha. Dana UED-SP dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp79 miliar untuk 122 Kampung dan 9 Kelurahan, yang terdiri dari APBD Provinsi Riau sebesar Rp17,5 miliar untuk 32 Kampung dan 3 Kelurahan serta APBD Kabupaten Siak sebesar Rp.61,5 miliar untuk 90 Kampung dan 6 Kelurahan. Perkembangan transaksi dana bergulir UED-SP ke masyarakat sampai bulan Agustus tahun 2015 sebesar Rp319,721 miliar lebih dengan total peminjam sebanyak 37.767 orang.

Program-program lain yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, antara lain : bantuan berupa alat pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, bantuan bibit pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, bantuan KUBE serta bantuan zakat produktif dan konsumtif dari Badan Amil Zakat Kabupaten Siak, disamping itu adanya bantuan dari perusahaan swasta dan BUMN/BUMD melalui Forum CSR.

Prioritas pembangunan antara lain peningkatan status kesehatan masyarakat, peningkatan tingkat kecerdasan masyarakat, pengembangan perekonomian daerah dan ekonomi kerakyatan, pengembangan pariwisata dan kebudayaan, pemenuhan infrastruktur dasar daerah, reformasi birokrasi. Program tersebut telah menjadi program nasional yang menjadi pilot proyek pemerintah pusat diantaranya ditunjuknya Kabupaten Siak sebagai Kabupaten percontohan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu pencapaian pembangunan tersebut juga dalam perencanaan yang dilaksanakan adanya penyelarasan antara pembangunan propinsi kabupaten dan nasional, antara lain dibidang peningkatan kualitas sumberdaya

manusia, percepatan dan perluasan infrastruktur, pemantapan pengendalian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil permuktahiran data penduduk Kabupaten Siak tahun 2012 yang telah dikonversi dan diverifikasi oleh tim direktorat pengolahan Data Kependudukan Direktorat Informasi Kependudukan Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri RI, penduduk Kabupaten Siak sampai akhir tahun 2012 berjumlah 335.540 jiwa terdiri dari 172.864 jiwa laki-laki 162.676 jiwa perempuan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mencapai 77,44, atau nilai IPM tertinggi ketiga di Provinsi Riau dan lebih tinggi dari rata-rata IPM Nasional yang masih berada di angka 73,81.

3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Perekonomian Kabupaten Siak Tahun 2011-2016

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya Pemerintahan dan Rakyat. Pembangunan tergantung pada Pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pulalah yang menikmati hasil-hasil pembangunan..

3.3.1 Faktor Sumber Daya

1. Faktor Sumber Daya Manusia
2. Faktor Sumber Daya Alam
 - a. Sumber Daya Mineral
 - b. Sumber Daya Lahan
3. Sumber Daya Modal

3.3.2 Faktor Budaya dalam Birokrasi

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat

menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

Dengan posisi dan kemampuan besar yang dimilikinya tersebut, birokrasi bukansaja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat secara teknis, tetapi juga mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat dan dunia usaha. Birokrasi dengan aparturnya juga memiliki berbagai keahlian teknis yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak non birokrasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-lain.

3.3.3 Faktor Politik

Peraturan perundang-undangan tertentu menjadi dasar jalannya suatu organisasi publik. Peraturan perundang undangan bila diberlakukan dapat menghambat atau malah sebaliknya, melonggarkan ruang gerak atau dinamika kerja dari suatu organisasi publik. Hal ini memang akan sangat tergantung dari siapa yang ada di balik peraturan perundang undangan tersebut. Apakah mereka mementingkan kepentingan umum (*publik interes*) atau kepentingan yang lain. Inilah yang disebut dengan aspek politik dari analisis lingkungan eksternal. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang No.22 tahun 1999, Menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memberikan dasar Pedoman bagi daerah untuk mengelola sumber penghasilan daerah secara mandiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

3.3.4 Faktor Sosial

Faktor sosial dapat berupa perubahan soaial yang ada dalam masyarakat seperti perubahan tingkah laku, sikap, prefensi, kebiasaan, kualitas, jumlah distribusi dan komposisi penduduk. Semua perubahan seperti ini dapat dapat mempengaruhi *supply and demand* dari barang dan jasa yang ada pada organisasi publik.

3.3.5 Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

Ketersediaan dan variasi teknologi sebagai faktor teknologi perlu di analisis karena peranannya dalam membantu proses kerja dari suatu organisasi atau sebaiknya justru mengancam nasib suatu organisasi. Perkembangan disiplin ilmu baik untuk pengetahuan yang bersifat teknis maupun manajerial dibidang pengelolaan keuangan daerah terus berkembang, penggunaan alat elektronik, seperti komputer dalam pengelolaan pasar sebagai sarana penerimaan daerah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi sejalan dengan perkembangan objek-objek penerimaan daerah. Penanganan yang lebih cepat, mudah, sederhana, efisien dan efektif telah mengharuskan organisasi untuk memanfaatkan teknologi yang terus berkembang tersebut.

Namun pemanfaatan teknologi akan lebih maksimal jika diikuti dengan upaya untuk dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi tersebut, tersedianya tenaga kerja yang terampil merupakan upaya adaptasi yang harus dilakukan secara terus menerus oleh Dinas-dinas terkait di Kabupaten Siak.

KESIMPULAN

Pada bab III telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kepemimpinan Bupati Kabupaten Siak dalam bidang pembangunan perekonomian Kabupaten Siak periode 2011-2016. Disamping itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Siak periode 2011-

2016 dan selanjutnya dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian ini:

1. Bapak Drs. H. Syamsuar M.Si merupakan Bupati Kabupaten Siak yang menjabat 1 periode yaitu pada tahun 2011-2016 yang menjalankan kepemimpinannya dengan baik yaitu memiliki kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi dan dorongan berprestasi dan sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Dengan kemampuannya itu beliau mampu membawa Kabupaten Siak dinobatkan sebagai Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) terbaik se-Indonesia.
2. Perekonomian Siak pada tahun mengalami kecenderungan untuk tumbuh negatif selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhannya dari 2011-2014 adalah -0,52 persen, 2,07 persen, -2,56 persen, dan -0,71 persen. Pada tahun 2014, seluruh kategori perekonomian di Kabupaten Siak tumbuh positif selain kategori Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh -10,95 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan sebagai berikut: kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 32,92 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 16,52 persen, kategori Jasa lainnya sebesar 10,18 persen, kategori Real Estat 8,64 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 8,30 persen, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,34 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,99 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,90 persen, kategori Industri Pengolahan sebesar 4,60 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 4,45 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,99 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,92 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor sebesar 3,88 persen, kategori Konstruksi sebesar 2,68 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,19 persen, dan kategori Jasa Pendidikan Sebesar 0,44 persen

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan perekonomian di Kabupaten Siak yaitu sumber daya, budaya dan birokrasi, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat-syarat yang mendukung.

SARAN

1. Menjadikan pribadi yang lebih baik merupakan hal yang harus ditingkatkan dalam diri seorang pemimpin karena dengan kualitas diri yang berkualitas mudah-mudahan dapat menciptakan hasil yang baik dengan sendirinya menjadikan kinerja pemerintahan makin meningkat dalam melayani masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Siak hendaknya lebih berupaya secara maksimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Siak dalam berbagai sector agar tingkat Kesejahteraan masyarakat lebih baik lagi.
3. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang ada, dengan cara memperbanyak kegiatan-kegiatan penyuluhan oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga akan menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan perlu adanya peningkatan kualitas serta kinerja aparatur daerah, karena pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam pengembangan kegiatan ekonomi daerah, dengan begitu berbagai sector yang ada dapat dikembangkan secara maksimal agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Bagong, Sayanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : kencana
- Covey, Stephen R. 2001. *Prinsip-Prinsip Kepemimpinan, Dinamis Intermaster*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Deddy T, Tikson dkk. 2005. *Evaluasi Pembangunan Pasca Otonomi daerah di Sulawesi Selatan, Kerjasama Bappeda Provinsi Sulsel dengan Lembaga Penelitian UNHAS, Makasar*.
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*, Jakarta : Rajawali Pers
- Komaruddin, 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- M. Arif Nasution. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta: Mandar Maju.
- Marzuki, 2000. *Metodologi Riset*, Yogyakarta : BPFU-UII
- Moedjiono, Imam. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta : UII Press
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, Bandung : Tarsito
- P. Joko Subagyo. 2004. *“Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek”*. Jakarta : Rineka Cipta
- Riadi dan Deddy Supriadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Siagian, Sondang P. 1983, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Gunung Agung

_____. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta

Sumarni, Murti. John Soeprihanto. 2003. *“Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*. Edisi ke lima. Yogyakarta : Penerbit Liberty

Sukarna, 1992, *administrasi management (suatu pemangantar study)*, Bandung : Bijaksana Amanah

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Rerika Aditama

Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers.

Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*, Jakarta : Magna Script Publishing.

Dokumentasi :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Siak
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak,

Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak.

Website:

1. <http://benangmerah.net/place/idn/riau/kabupaten-siak>

2. <http://www.riauterkini.com/sosial.php?ar=93433>

3. <http://halloriau.com/read-politik-66443-Drs-H-Syamsuar-MSi-Sosok-PemimpinAmanah-Lanjutkan-Pembangunan.html#sthash.1Kt0fAc3.dpuf>

4. <http://regionalinvestment.bkpn.go.id/news/wssipid/ekonomipdrb?ia=1405&is=43>

Jurnal:

1. Eko purwanto S.IP *Implementasi Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Sungai Apit Tahun 2011*. Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau : Tahun 2015.

2. Refli Erlianto S.IP *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Di Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2013*. Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau : Tahun 2014